

**RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA
DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO,
KABUPATEN WONOGIRI**



Oleh :

C.H. MUDASIH
NIM. 04132086/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Pembangunan selalu membutuhkan tanah sebagai media untuk mengimplementasikan segala kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Keterbatasan tanah sebagai modal pembangunan, mensyaratkan penyediaan tanah dengan cara pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah di Indonesia pada kenyataannya sering dilakukan menyimpang dari ketentuan semestinya, yang terjadi pada akhirnya bukanlah pembebasan tanah melainkan penggusuran yang mengakibatkan marginalisasi sosial. Masyarakat tidak memiliki akses untuk bersuara dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, respons mereka terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan tidak pernah diperhatikan, sehingga pada saatnya timbul resistensi dari masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah karena dianggap sebagai kebijakan yang tidak adil bagi mereka.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat Desa Gebangharjo terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi kegiatan pembangunan yang tidak secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat yaitu berupa pembangunan museum karst. Selain itu diteliti pula manfaat yang diperoleh masyarakat dari rencana pembangunan tersebut sehingga mampu mempengaruhi respons yang muncul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survai dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: kuesioner, wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dilaksanakan terhadap 32 responden yang merupakan bagian dari populasi berjumlah 42 orang. Analisis data menggunakan uji statistik dengan cara Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat serta seberapa besar pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat memberikan respons non resisten terhadap kegiatan pengadaan tanah museum karst, ditunjukkan oleh jawaban responden yang menyatakan bersedia melepaskan tanahnya sebanyak 24 orang atau sebesar 75%. Selanjutnya hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan yang akan dilaksanakan, kesesuaian ganti rugi serta penggunaan tanah yang akan dibebaskan secara bersama – sama memberikan pengaruh terhadap respons masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah sebesar 47,4 % dan masih terdapat 52,6 % variabel lain diluar variabel yang diteliti. Diantara ketiga variabel, hanya variabel kesesuaian ganti rugi yang berpengaruh signifikan terhadap respons masyarakat dengan nilai t hitung sebesar 4,080 lebih besar dari t tabel pada taraf signifikansi 95% yaitu sebesar 1,701. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = -0,051 - 0,049X_1 + 0,188X_2 - 0,094X_3$.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Pembangunan	11
2. Pengadaan tanah	14
3. Masyarakat	16
4. Respons Masyarakat	18
B. Tinjauan Yuridis	26
C. Kerangka Pemikiran.....	29
D. Hipotesis	32
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Metode Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi	34

D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Variabel Penelitian	36
G. Analisis Data	38
H. Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
A. Keadaan Wilayah	44
B. Kependudukan.....	46
C. Tinjauan Rencana Pembangunan Museum Karst Dunia	50
D. Tinjauan Mengenai Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Museum Karst Dunia.....	52
E. Profil Responden.....	55
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Respons Masyarakat Terhadap Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Museum Karst Dunia	59
2. Pengaruh variabel pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan yang akan dilaksanakan, kesesuaian ganti rugi yang akan diberikan serta penggunaan tanah yang akan dibebaskan terhadap respons masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Museum Karst Dunia	62
3. Manfaat Rencana Pembangunan Museum Karst Dunia.....	81
B. Pembahasan.....	88
1. Uji F Regresi (Uji Keseluruhan)	88
2. Uji t (Uji Parsial).....	90
3. Persamaan Regresi	93
C. Pembuktian Hipotesis	94

BAB VI. PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bergulirnya era reformasi melahirkan kebebasan untuk bersuara bagi seluruh masyarakat termasuk suara-suara masyarakat akar rumput yang selama orde baru mati suri, menjadi pihak yang tertekan, tertindas bahkan tersisih. Masyarakat selalu menjadi korban dari segala kebijakan yang beralih untuk kepentingan pembangunan, dalam proses pembangunan rakyat telah dijauhkan dari seluruh akses dan kontrol mereka terhadap sumberdaya ekonomi, politik dan budaya secara berkelanjutan sebagai sebuah proses pemiskinan. Amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" hanyalah sebuah slogan yang tidak dirasakan realisasinya oleh masyarakat.

Sebagai salah satu contoh adalah dalam kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan. Pemerintah yang seharusnya menjadi penengah yang netral, melindungi dan mengayomi pemilik tanah yang menjadi obyek pembebasan tanah, namun senyatanya banyak ditemui bahwa pemerintah lebih memihak pada kepentingan pemilik modal dengan dalih untuk kepentingan pembangunan. Pemerintah bahkan menyebarkan slogan "berkorban bagi pembangunan" untuk menekan masyarakat agar bersedia

menyerahkan tanahnya.

Kasus-kasus seperti pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol Semarang – Solo, tol Cinere – Jagorawi, Depok dan pembangunan Banjir Kanal Timur Jakarta merupakan contoh dari kasus – kasus pengadaan tanah yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik.

H. Abdurrahman (1994:2) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah seringkali kepentingan umum dijadikan "kambing hitam" sebagai alasan untuk mengambil tanah-tanah penduduk untuk berbagai kepentingan tertentu dengan menggunakan dalih bahwa hal itu adalah demi pembangunan untuk kepentingan umum. Bilamana penduduk keberatan menyerahkan maka dengan cara seenaknya menuduh mereka sebagai perintang pembangunan. Padahal mungkin saja apa yang dinamakan kepentingan umum atau kepentingan pembangunan itu tidak ada.

Tidak mengherankan jika kemudian menyeruak fenomena marginalisasi sosial. Masyarakat menjadi orang-orang yang terpinggir karena harus kehilangan tanahnya. Ganti rugi yang diberikan tidak sebanding dengan harga tanah miliknya, sehingga yang terjadi akhirnya bukanlah pembebasan tanah melainkan penggusuran tanah. Kenyataan itu menyebabkan pandangan negatif masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelaku pengadaan tanah. "Rakyat sering kecewa karena setelah tanah mereka dibebaskan, ternyata *bukan proyek pembangunan* yang muncul dan bermakna bagi rakyat melainkan proyek lain yang secara ekonomis dan sosial tidak mempunyai makna bagi mereka" (Loekman Soetrisno, 1995:64).

Sebenarnya jika ditilik lebih lanjut, permasalahan-permasalahan pengadaan tanah yang timbul selama ini bukan disebabkan semata-mata oleh kelemahan peraturan tentang pengadaan tanah. Akan tetapi, cenderung karena pelaksanaannya yang kurang konsisten menerapkan asas-asas dalam peraturan hukum mengenai pengadaan tanah. Sebagai contoh antara lain :

- a. Masalah penolakan ganti kerugian yang dirasa tidak sesuai dalam pengadaan tanah yang senantiasa merupakan isu sentral dari setiap pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia.
- b. Masalah pelaksanaan musyawarah untuk mufakat yang kadang-kadang diwarnai dengan intimidasi, sehingga meskipun pembebasan tanah yang semestinya dilakukan secara sukarela namun bagi yang empunya tanah dirasakan sebagai upaya paksa.

Loekman Soetrisno (1995, dalam Dominikus B. Insantuan, 2003:18) menyatakan bahwa dalam komunikasi pembangunan umumnya rakyat harus menerima saja hal-hal yang menurut elit penguasa sebagai suatu kebenaran dan akan berguna bagi mereka. Umpan balik dari masyarakat tidak terjadi dengan lancar, hal itu disebabkan karena jalur-jalur yang mampu menyalurkan pendapat mereka sangat terbatas. Hal itu berarti dalam proses pengadaan tanah, pemilik tanah hanya diperlakukan sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

Pemerintah sebagai pelaksana pengadaan tanah, hendaknya tanggap terhadap keinginan masyarakat pemilik tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain di atasnya yang terkena proyek pembangunan. Kepentingan masyarakat semestinya diperhatikan sehingga masyarakat merasa terlibat dalam kegiatan pembangunan yang akhirnya menumbuhkan respons positif dari masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian terhadap salah satu agenda kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri yaitu Pembangunan Museum Karst Dunia. Pembangunan museum tersebut dipandang perlu oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, karena Kabupaten Wonogiri memiliki wilayah berupa kawasan karst dan merupakan bagian dari kawasan karst Pegunungan Sewu yang membentang dari Kabupaten Gunung Kidul sampai dengan Kabupaten Pacitan. Kawasan karst tersebut menyimpan potensi sumber daya yang sangat beragam, diantaranya sumber daya lahan, sumber daya mineral, sumber daya air dan sumber daya alam, selain itu juga memiliki nilai ilmiah dan nilai sosial budaya yang tinggi.

Kawasan Karst Kabupaten Wonogiri menurut beberapa ahli geologi merupakan satu kesatuan ekosistem geofisik, dengan geomorfologi yang sangat unik dan tidak ada duanya didunia serta merupakan gudangnya peninggalan manusia prasejarah. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membangun museum karst yang berfungsi menyediakan sarana visualisasi mini tentang kawasan karst serta menyediakan informasi kepada semua pihak yang berminat, baik untuk kepentingan pendidikan, eksplorasi penelitian, pelatihan, petualangan, pengembangan dan konservasi. Sebagai upaya untuk menunjang rencana pembangunan Museum Karst Dunia tersebut, maka dilakukan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri.

Dilihat dari maksud penggunaan tanah yang akan dibebaskan dari masyarakat, yaitu untuk pembangunan Museum Karst yang secara implisit tidak memberikan manfaat ekonomis secara langsung, maka menyadarkan penulis tentang pentingnya mengetahui respons masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut. Hal itu mengingatkan bahwa masyarakat terutama pemilik tanah adalah pihak yang merasakan dampak langsung pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah, baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari pembangunan tersebut. Pemerintah perlu menyatukan persepsi dengan masyarakat mengenai tujuan pembangunan, sehingga dapat dihindarkan benturan kepentingan yang mungkin terjadi, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“RESPONS MASYARAKAT TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MUSEUM KARST DUNIA DI DESA GEBANGHARJO, KECAMATAN PRACIMANTORO, KABUPATEN WONOGIRI”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut ini :

1. Bagaimana respons masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan Museum Karst Dunia di

Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri?

2. Apakah respons masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Museum Karst Dunia dipengaruhi oleh variabel pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan yang akan dilaksanakan, kesesuaian ganti rugi yang akan diberikan serta penggunaan tanah pada area yang akan dibebaskan?
3. Apakah manfaat rencana pembangunan Museum Karst Dunia bagi masyarakat di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Museum Karst Dunia di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.
- b. Untuk mengetahui apakah respons masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Museum Karst Dunia dipengaruhi oleh variabel pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan yang akan dilaksanakan, kesesuaian ganti rugi yang akan diberikan serta penggunaan tanah yang akan dibebaskan.

- c. Untuk mengetahui manfaat rencana pembangunan Museum Karst Dunia di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri bagi masyarakat disekitarnya.
2. Kegunaan penelitian :
- Ditinjau dari kegunaannya, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :
- a. Sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam kegiatan pengadaan tanah selanjutnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri serta pihak-pihak terkait guna mendapatkan hasil yang optimal;
 - b. Secara akademis dapat menambah kajian dan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan pengadaan tanah.

D. Batasan Penelitian

1. Didasarkan pada waktu pelaksanaannya maka Peraturan Pengadaan Tanah yang di gunakan adalah:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres 36 Tahun 2005 tetap digunakan karena dengan dikeluarkannya Perpres 65 Tahun 2006 bersifat menyempurnakan dan tidak mencabut Perpres 36 Tahun 2005.

- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 Tahun 1994 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- PMNA/KaBPN nomor 1 Tahun 1994 merupakan peraturan pelaksanaan dari Keppres 55 tahun 1993. PMNA/KaBPN nomor 1 Tahun 1994 masih digunakan karena dalam Perpres 36 Tahun 2005 hanya mencabut Keppres 55 Tahun 1993 dan tetap memberlakukan peraturan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru seperti disebutkan dalam Pasal 21 (Ketentuan Peralihan) Perpres 36 Tahun 2005.
2. Cara pengadaan tanah yang dibahas adalah pengadaan tanah secara sukarela yang tunduk pada prinsip perikatan antara pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah.
 3. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis dengan tidak mengesampingkan keakuratan dan kejelasan permasalahan maka perlu dibatasi mengenai manfaat pembangunan yang diteliti yaitu manfaat pembangunan museum karst dunia secara sosial ekonomi bagi masyarakat dan fisik wilayah disekitarnya.

E. Batasan Istilah

1. Respons

Response cries those utterances oops which are not obviously talk in the sense of possessing a conscious communicative intent (Goffman,1981). Although apparently

trivial and spontaneous in character and often not deliberately aimed at communication, they nevertheless communicate a recognition by the social actor that he or she has transgressed the normal expectations of control over the body that this lack of control was a mere accident etc as such an analysis of response cries emphasizes the socially organized character of behaviour which at first sight may appear non social. (David Jary and Julia Jary, 1991:531)

Respons adalah tanggapan, reaksi atau jawaban (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:952). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, diketahui bahwa respons merupakan suatu tanggapan untuk mewakili perasaan para aktor sosial sebagai suatu proses komunikasi dalam bentuk ucapan atau tindakan yang sadar, serta perilaku yang merupakan harapan mereka.

Berdasarkan pengertian mengenai respons diatas maka peneliti membatasi istilah respons dalam penelitian ini sebagai suatu tanggapan yang diwujudkan dalam suatu tindakan dari pemilik tanah terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan Museum Karst Dunia.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya teritorial, bangsa dan golongan (R. Linton dalam H. Abu Ahmadi, 1991:106).

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat pemilik tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah obyek pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan Museum Karst Dunia di Desa Gebangharjo,

Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri.

3. Pengadaan Tanah

Pengertian Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006).

4. Pembangunan

“Pembangunan adalah upaya sadar dan melembaga untuk mewujudkan hidup yang lebih baik” (Moeljarto Tjokrowinoto, 2002:1), dalam hal ini adalah upaya pembangunan Museum Karst Dunia.

5. Resisten berasal dari kata resistensi adalah ketahanan; perlawanan (Kamus Ilmiah Populer, 1994:673) sedangkan non resisten adalah tidak melawan; menerima, dalam hal ini adalah tindakan melawan atau menerima dari masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Museum Karst Dunia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan Museum Karst Dunia di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri mendapat respons non resisten dari masyarakat.
2. Variabel pemahaman masyarakat mengenai kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan yang akan dilaksanakan (X1), kesesuaian ganti rugi yang akan diberikan (X2), dan penggunaan tanah pada area yang akan dibebaskan (X3) yang secara bersama – sama memberikan pengaruh nyata pada respons masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan Museum Karst Dunia (Y) sebesar 47,4%. Variabel yang sangat signifikan mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk melepaskan tanah adalah variabel kesesuaian ganti rugi yang akan diberikan.
3. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Museum Karst Dunia di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri telah memberikan manfaat secara sosial ekonomi bagi masyarakat dan peningkatan prasarana wilayah disekitarnya. Manfaat tersebut yaitu :

- a. Percepatan pembangunan prasarana wilayah;
- b. Terciptanya daerah tujuan wisata baru;
- c. Penciptaan lapangan kerja baru;
- d. Peningkatan wawasan berpikir dan keterampilan masyarakat;
- e. Penghijauan dan eksplorasi sumber air bersih.

B. Saran

1. Pemerintah selaku pelaksana pembangunan dan sekaligus berperan sebagai pemangku kebijakan, hendaknya tidak mengeluarkan kebijakan pembangunan yang semakin menyengsarakan masyarakat. Kegiatan pengadaan tanah hendaknya tidak berubah menjadi penggusuran, oleh sebab itu besarnya ganti rugi yang diberikan harus layak dan tidak merugikan masyarakat.
2. Tahapan penyuluhan dan musyawarah dalam kegiatan pengadaan tanah hendaknya digunakan sebagai media efektif untuk menjalin komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat guna mencapai persamaan persepsi mengenai pentingnya pembangunan. Komunikasi yang baik dan kesempatan yang luas untuk menyampaikan pendapat bagi masyarakat merupakan hal penting untuk meminimalisasi resistensi masyarakat terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan.
3. Pelaksanaan pembangunan hendaknya bukan hanya dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin diperoleh pemerintah, namun perlu pula memberikan manfaat bagi masyarakat yang telah

berkorban bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Sebisa mungkin manfaat yang diberikan bukan hanya manfaat materiil namun juga memberikan manfaat nonmateriil bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H. (1994). Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi, Abu. (1991). Ilmu Sosial Dasar. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Anonim. (2007). Pembebasan Lahan BKT Selesai 2007. Kompas (Februari 2007).
- Anonim. (2007). Menunggu Realisasi Tol Semarang – Solo, Penolakan Akibat Sosialisasi Masih Kurang. Kedaulatan Rakyat (Agustus 2007)
- Anonim. (2007). Negosiasi Ganti Rugi Lahan Tol di Depok Alot. Pelita (September 2007).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri. (2007). Laporan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Museum Kawasan Karst Dunia Di Kabupaten Wonogiri.
- Depari, Eduard dan Colin Mac Andrews. (1991). Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. (2001). Analisis Regresi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Insantuan, Dominikus. (2003). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengadaan Tanah. Widya Bhumi, Edisi 11 Tahun 4, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Jary, David and Julia Jary. (1991). Collins Dictionary Of Sociology. Harper Collins Publishers, British.
- Margolang, Nazaruddin. (2008). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. ([http:// www.nmargolang.com](http://www.nmargolang.com), diakses 1 April 2008).
- Partanto, Pius dan M. Dahlan Al Barry. (1994). Kamus Ilmiah Populer. Penerbit, Arkola Surabaya.

- Prasetyo, Rudy. (2006). Warga Ingin Ganti Rugi Banjir Kanal Timur Dipercepat. (<http://www.tempointeraktif.com>, diakses 11 Maret 2008)
- Rakhmat, Jalaluddin. (2003). Psikologi Komunikasi. Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. (1991). Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. (2004). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soemarwoto, Otto. (1994). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (2002). Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Usman, Sunyoto. (2003). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Veeger, K. J. (1990). Realitas Sosial. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Walgito, Bimo. (2002). Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.